

Penggunaan Aplikasi *E-Village Budgeting* Dalam Mengurangi Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banyuwangi

Khusnul Hatimah¹, Dewi Sekar Kencono^{1*}

¹*Department of Government Affairs and Administration Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia*

**Corresponding author.*

Email: dewisekarkencono@umy.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penggunaan aplikasi *E-Village Budgeting* dalam upaya menekan terjadinya kasus tindak pidana korupsi di daerah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dikarenakan perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya di Kabupaten Banyuwangi masih tergolong diangka yang cukup tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Oleh karena itu, di perlukannya sebuah inovasi khusus seperti *E-Village Budgeting* yang dapat di gunakan dalam melakukan pengelolaan keuangan secara transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mengurangi kasus tindak pidana korupsi. Penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi *E-Village Budgeting* telah berjalan dengan baik. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi *E-Village Budgeting* merupakan salah satu tindakan yang tepat dalam mengurangi kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyuwangi. Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan massif memberikan dampak yang positif dengan adanya inovasi aplikasi *E-Village Budgeting* memiliki fungsi salah satunya dapat mengurangi terjadinya kasus tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *E-Village Budgeting, Kabupanten Banyuwangi, Korupsi*

Abstract. *In order to reduce the incidence of corruption cases in the Banyuwangi Regency area, this study aims to determine the best method for using the E-Village Budgeting application. This is due to the corruption's continued growth in Indonesia, particularly in the Banyuwangi Regency, and the slow pace at which it is being eradicated. Therefore, in order to lessen instances of criminal acts of corruption, a unique innovation is required, such as E-Village Budgeting, that can be used to conduct financial management in a transparent and accountable manner. This study employs qualitative research along with a literature review. The findings of this study show that the E-Village Budgeting application has been successfully used for village financial management. Using the E-Village Budgeting application to increase transparency and accountability in village financial management is one of the effective methods to lower the number of corruption cases in Banyuwangi Regency. The invention of the E-Village Budgeting application, one of which is to lessen the occurrence of corruption cases, has a positive impact as a result of the rapid and massive development of information technology.*

Keywords: *Corruption, Banyuwangi Regency, E-Village Budgeting*

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi *E-Village Budgeting* dalam upaya menekan terjadinya kasus tindak pidana korupsi di daerah Kabupaten Banyuwangi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang dimana maksud dari negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yakni negara yang di dalam nya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila di langgar. Oleh karena itu, segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan di wilayah NKRI harus di dasarkan pada hukum dan segala bentuk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengacu pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka segala bentuk kekerasan maupun tindak pidana seperti halnya tindak pidana korupsi harus di tangani berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia tidak berbanding lurus dengan pemberantasan kasus korupsi yang selama ini dianggap lamban. Oleh karena itu, di perlukannya sebuah inovasi yang dapat di gunakan dalam melakukan pengelolaan keuangan secara transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mengurangi kasus tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mencegah adanya tindak pidana korupsi, Kabupaten Banyuwangi menciptakan sebuah inovasi berupa *E-Village Budgeting* (EVB) yang dimana salah satu fungsi dari di bentuk nya inovasi berupa EVB ini agar bisa melakukan pengelolaan keuangan secara trasparansi dan akuntabilitas. Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pemerintahan telah dilakukan di Indonesia mendasar pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* Indonesia. Berawal dari Inpres tersebut bergulir lah pengembangan e-government di Indonesia dengan penantaan sistem serta proses kerja baik pada lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Pengembangan TIK dapat dilakukan bersamaan dengan onotomi daerah yang menggelora sehingga pola kinerja pemeritah terintegrasi dan terkoordinasi. Pembuatan aplikasi *E-Village Budgeting* yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten banyuwangi merupakan terobosan dalam penggunaan TIK pada level kecamatan dan desa. Sejak tahun 2015, secara khusus aplikasi ini menerapkan penganggaran secara online yang menjangkau di 189 desa yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi (Mutamimmah et al., 2018).

Program dengan aplikasi *E-Village Budgeting* (EVB) merupakan inovasi dengan menggunakan TIK yang digunakan dalam penganggaran desa dengan terintegrasi dari proses perencanaan, tata Kelola/ manajemen administrasi, monitoring dan evaluasi yang bisa diakses kapan, dimanapun dan siapapun secara luas. Aplikasi ini memberikan integrasi keuangan dan proses pembangunan ditingkat desa dan kabupaten, sehingga keselarasan dalam ketercapaian program

dapat tercapai serta mengurangi intervensi pada program yang berjalan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa sebelumnya diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub) Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa. Perbub tersebut kemudian diperbarui dalam Peraturan Bupati (Pebub) Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Selanjutnya, berkaitan dengan pengawasan dilakukan melalui sistem lengkap dengan titik koordinat dan gambar perkembangan proyek pembangunan, sehingga menutup celah adanya proyek ganda atau fiktif (banyuwangikab.go.id). Sistem aplikasi EVB yang berjalan pada tingkat desa bersinergi dengan pemerintah kabupaten. Hal ini diharapkan mempermudah dalam melakukan kontrol dan monitoring anggaran maupun keberlangsungan program yang berjalan sesuai dan tepat sasaran dengan kebutuhan warga masyarakat serta transparansi di sektor publik. Tidak hanya itu, dengan adanya E-Village Budgeting (EVB) juga diharapkan agar dapat mencegah adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, penelitian ini merumuskan masalah bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu wilayah kabupaten di Jawa Timur yang menciptakan sebuah inovasi berupa EVB yang dimana salah satu fungsi dari bentuk nya inovasi berupa EVB ini agar bisa melakukan pengelolaan keuangan desa secara transparansi dan akuntabilitas. Dengan dilakukannya pengelolaan keuangan desa secara transparansi dan akuntabilitas ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan masalah bagaimana penggunaan aplikasi *E-Village Budgeting* dalam upaya menekan dan mengurangi kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyuwangi.? Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan aplikasi *E-Village Budgeting* pada upaya menekan dan mengurangi terjadinya kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyuwangi

LITERATUR REVIEW

Menurut Nurita (2016), di era globalisasi dan otonomi daerah yang telah memunculkan semangat keterbukaan menuntut adanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah serta terkait dengan pembangunan suatu daerah. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang memudahkan masyarakat dalam menerima informasi. Hal ini dikarenakan berbagai bentuk informasi tersebut dapat di peroleh dengan mudah melalui sebuah aplikasi. Beragam informasi terkait dengan perkotaan juga dapat di peroleh dengan mudah melalui program yang bernama *smart city* (Utomo & Hariadi, 2016). Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat memperoleh pelayanan secara mudah tanpa membutuhkan waktu yang lama (Widodo, 2016). Beberapa daerah yang sudah menerapkan program *smart government* dan *smart city* mengalami

peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas (Hidayat, 2016). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Pratiwi (2016) lebih mengkaji terkait dengan contoh inovasi yang dikembangkan sebagai bentuk penerapan *E-Government* khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan inovasi berupa *Electronic-Village Budgeting* (EVB). aplikasi *E-Village Budgeting* (EVB) merupakan inovasi berbasis *website* dengan menggunakan TIK yang digunakan dalam penganggaran desa dengan terintegrasi dari proses perencanaan, tata Kelola/ manajemen administrasi, monitoring dan evaluasi yang bisa diakses kapan, dimanapun dan siapapun secara luas. Dengan adanya aplikasi EVB, pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dilakukan secara manual, akan tetapi kini telah dilakukan secara *online* (Pratiwi, 2016).

Menurut Iswahyudi (2017), penggunaan EVB di pengaruhi oleh sikap pengguna dari sistem EVB, yang dimana kepercayaan pengguna mejadi tolak ukur dalam keberhasilan dari penerapan sistem ini. Dengan adanya aplikasi EVB, pengelolaan keuangan pada tiap-tiap desa di Kabupaten Banyuwangi menjadi lebih murah dibandingkan sebelum penerapan aplikasi EVB yang mengakibatkan biaya yang tinggi dan pengelolaan yang tidak efisien. Laporan keuangan secara otomatis dihasilkan melalui sistem EVB. Implementasi EVB, membuat pelaporan pengelolaan dana desa menjadi lebih mudah, transparan dan akuntabel. Penggunaan dana pembangunan di desa dapatt digunakan tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah masyarakat, meningkatkan kemakmuran dan kualitas hidup masyarakat (Puspita, 2018).

Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara *online* melalui sistem EVB dilakukan melalui beberapa tahapan yakni yang pertama tahap perencanaan dan kedua tahap pencairan APBDes (Mutamimmah et al., 2018). Oktavia et al., (2019) menjelaskan bahwa kemudahan yang diperoleh dalam melakukan pengelolaan keuangan melalui sistem aplikasi E-Village Budgeting. Sistem EVB yang diterapkan dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam melakukan pengelolaan keuangan telah berjalan efektif. Hal ini dikarenakan, pengelolaan keuangan yang dilakukan secara *online* berbeda dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara manual (Satia Utama & Zahari, 2019). Akan tetapi, Wahyuni et al., (2019) menjelaskan bahwa penerapan sistem E-Village Budgeting dalam pengelolaan keuangan cukup baik dan efektif, akan tetapi masih terdapat beberapa aspek keamanan yang perlu di tingkatkan (Wahyuni et al., 2019).

Penerapan EVB merupakan upaya dalam memenuhi kriteria akuntabilitas dan transparansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai wujud tinjauan dari indikator terakomodasinya partisipasi warga, pertanggungjawaban penggunaan dana publik, pelaporan yang tepat waktu serta kemudahan akses informasi. Selain itu dalam efektivitas serarapan anggaran pada pemeritnah desa dengan menunggunakan EVB meningkatkan kinerja keuangan dengan diraihnya peredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dari BPK RI (Oktavia & Handayani, 2019). Dengan adanya aplikasi E-Village Budgeting setidaknya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran desa yang dilakukan secara *online* (Nurjamiyah & Dewi, 2020).

Penelitian-penelitian terdahulu memiliki kesamaan pada metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, yang dimana di dominasi dengan penggunaan metode penelitian kualitatif walaupun ada beberapa yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian-penelitian terdahulu hanya terbatas pada: *Pertama*, hanya memfokuskan pada penerapan *E-Government* dan *Smart City* secara umum nya saja, akan tetapi belum pada bentuk aplikasi seperti apa yang dapat di gunakan dalam perwujudan *good governance* tersebut. *Kedua*, hanya menaruh perhatiannya pada pemanfaatan aplikasi EVB dalam pengelolaan keuangan tanpa memahami lebih lanjut apakah dengan penerapan aplikasi EVB tersebut penyusunan laporan keuangan dapat berlangsung dengan baik atau tidak. *Ketiga*, hanya membatasi pada pengelolaan keuangan melalui EVB sebagai sarana transparansi pengelolaan keuangan, akan tetapi belum mengkaji tentang bentuk upaya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Banyuwangi dalam mengurai tindak pidana korupsi melalui aplikasi EVB tersebut.

Setelah membaca dan memahami beberapa hasil dari penelitian yang di lakukan oleh para peneliti terdahulu yang dapat di gunakan sebagai bahan panduan dalam melakukan penelitian ini, maka dalam hal ini penulis memilih judul yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi EVB dalam mengurangi terjadinya kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyuwangi. Alasan penulis memilih judul tersebut karena masalah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia terus terjadi baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, dengan adanya penggunaan aplikasi EVB tersebut apakah dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menggunakan kesempatan secara tidak bertanggung jawab di daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas dan transparansi, yang dimana akuntabilitas public dimaknai sebagai sebuah kewajiban baik secara individu maupun penguasa yang dipercaya (pemangku kekuasaan) untuk mengelola sumberdaya public. Akuntabilitas mewujudkan kewajiban instansi pemerintah untuk melakukan pertanggungjawaban atas misi organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan secara periodic dan terukur baik dalam keberhasilan maupun kegagalan. Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumberdaya public yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang yang memerlukan informasi.

Pengelola dana publik seperti pemerintah daerah harus mampu menyediakan informasi keuangan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya/ dipertanggungjawabkan. Pemerintah Pusat maupun Daerah merupakan subyek pemberi informasi bertanggungjawab dalam pemenuhan hak-hak publik

seperti hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya (Oktavia & Handayani, 2019).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan dan analisis yang dilakukan yakni analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang di peroleh melalui buku, jurnal, dan sebagainya. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan fenomena dengan memahami apa yang dinilai dengan berdasarkan subjek penelitian. Studi kepustakaan adalah proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun.

3. PEMBAHASAN

a. Aplikasi E - Village Budgeting

Electronic Village Budgeting (EVB) adalah sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis website tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. (Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015). EVB adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka tata Kelola alolasi dana desa untuk menjadi akuntabel dan transparan. EVB aplikasi pertama dengan mengintegrasikan TIK untuk sistem pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi. Melalui EVB, Pemkab Banyuwangi dapat melakukan kontrol, monitoring, evaluasi serta pengawasan terhadap jalannya pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi dalam sistem website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

EVB merupakan pengembangan atau generasi ke dua dari Sistem Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tujuan secara khusus adalah untuk pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi dengan SIKD. Integrasi semua data dalam EVB langsung terhubung dengan SIKD Pemkab Banyuwangi. Dengan pengembangan berbasis Web dengan intranet membuat EVB menjadi lebih efektif dan efisien dalam implementasi pada lingkungan Pemkab Banyuwangi. Ketersediaan infrastruktur sebagai pendukung jaringan intranet mempermudah proses integrasi dan transfer data yang berlangsung dalam EVB. Penggunaan konsep *open source* dan *open platform* dalam pengoperasian EVB untuk mempermudah pelaporan yang dilakukan secara mandiri oleh pihak terkait. EVB dikembangkan dengan dukungan teknis *hardware*, dan *software*. Server yang digunakan dalam EVB antara lain (1) Operating System (OS) menggunakan GNU Linux atau MS Windows 2000/2003/XP; (2) Apache Webserver versi 1.3 keatas; (3) PHP dan mySQL versi 5

keatas Sedangkan pada sisi Client yang dibutuhkan untuk akses EVB adalah sebagai berikut (1) Operatitng System (OS) dapat menggunakan GNU Linux atau MS Windows XP/7/ ; (2) Web Browser dapat menggunakan Mozilla Ver 33.1, Microsoft Internet Explorer ver.8, Netscape Ver.8 atau keatas. Client harus bisa terkoneksi ke server menggunakan protocol TCP-IP untuk mengakses intranet webserver EVB. Pengguna EVB sebelum menggunakan aplikasi tersebut perlu melakukan pendaftaran untuk mendapatkan *username* dan *password* guna melakukan proses login aplikasi melalui alamat web <http://evb.banyuwangikab.go.id/> (Oktavia & Handayani, 2019).

Setelah mendapatkan *username* dan *password* pengguna bisa login dalam EVB. Tentukan tahun yang akan di periksa untuk mempermudah dalam melakukan cek data. Kemudian, pada kolom pemilihan aplikasi, modul bagian akan ditampilkan. Pilihan yang disajikan antara lain menu Perencanaan, Pelaporan, dan Penganggaran. Selanjutnya pemilihan tahun APBD perlu dilakukan untuk menampilkan data kepada pengguna terkait lampiran penjabaran APBD, kecamatan, desa atau kelurahan, status, dan sumber dana. Melalui tampilan ini bisa pengguna bandingkan hasil perencanaan tersebut dalam berbagai format. Tampilan dalam web EVB akan menampilkan kode anggaran yang digunakan, lalu uraian mengenai kegiatannya, volume, satuan, harga, dan jumlah dana yang digunakan. Jenis-jenis informasi yang tersedia di dalam *output* aplikasi EVB yang berupa rekapitulasi RKPDesa, Laporan Penatausahaan Keuangan Desa, Laporan Realisasi APBDesa dan Laporan Realisasi Kinerja Kegiatan Desa. Proses monitoring bisa dilakukan oleh berbagai pihak terkait (dinas/ instansi) dalam proses pengelolaan dana desa dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Monitoring yang dilakukan secara *real time* bersama-sama dengan instansi terkait dan pemerintah desa.

Aplikasi EVB dikembangkan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat yang terintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemanfaatan jaringan TIK hingga level desa dapat meningkatkan kualitas kinerja pemeritah baik di level desa maupun pada level di atasnya. Salah satunya dalam proses pengelolaan keuangan desa yang didalamnya juga mengelola dana desa berbasis webserver dan online. Penyelenggaraan pemerintahan desa di kabupaten saat ini menggunakan sistem aplikasi yang terkoneksi intranet yang terhubung dengan kecamatan dan seluruh instansi atau organisasi terkait. Sehingga proses pengelolaan ADD dapat dengan mudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah dapat difasilitasi. Akses ke aplikasi EVB kini terbatas pada instansi terkait dan aparat desa. Awalnya, aplikasi EVB ditujukan untuk kepentingan umum, namun seiring berjalannya waktu, telah dimodifikasi sehingga hanya instansi terkait dan perangkat desa yang dapat mengaksesnya. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mencegah oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan data yang ada dan dapat diakses. (Rizaldy et al., 2020).

Selain itu, EVB memanfaatkan *open source* dan *open platform* sehingga Pemkab Banyuwangi dapat mengelola aplikasi ini secara mandiri. Sistem EVB ini terdiri dari tiga frame utama: (1) *Frame Header*, yang berisi identitas instansi pengguna aplikasi, seperti nama instansi, logo yang dapat diatur oleh administrator, tanggal login, dan pengguna. Kelompok; (2) *Frame Navigasi*, Terdiri dari sekelompok menu yang disediakan oleh sistem EVB. Pengguna EVB dapat memilih dari menu di sisi kiri aplikasi EVB, dan (3) *Frame Content* adalah frame yang berisi menu-menu dari frame navigasi. Pada bagian ini, pengguna dapat melakukan transaksi dan memasukkan data. Setiap menu dalam aplikasi EVB berisi empat tampilan di sebelah kanan: (1) Tampilan untuk data daftar; (2) Tampilan untuk melihat detail isi data; (3) Tampilan untuk entri data; (4) Tampilan untuk memodifikasi data.(Oktavia & Handayani, 2019).

b. *E-Village Budgeting Dalam Penglolaan Keuangan Desa*

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mulai merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penggunaan anggaran desa melalui sistem penganggaran online agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerapkan sistem EVB, yaitu sistem penganggaran desa yang terintegrasi jaringan (online). Di Kabupaten Banyuwangi, dimana semua anggaran dan program desa terintegrasi secara online, sistem EVB berbasis online pertama di Jawa Timur baru efektif digunakan sejak tahun 2015. (Puspita, 2018).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sepuluh persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). UU Desa telah menempatkan desa sebagai yang terdepan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola potensinya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk Dana Desa yang cukup untuk dialokasikan ke Desa. Anggaran Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 20,7 triliun dengan alokasi rata-rata Rp 280 juta per desa. Pada tahun 2016, Dana Desa tumbuh menjadi Rp. 46,98 triliun, memberikan rata-rata Rp. 628 juta. Pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 60 triliun, memberi setiap desa rata-rata Rp. 800 juta. (Rizaldy et al., 2020).

Sejak tahun 2015, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 mengatur tentang pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan sistem *E-Village Budgeting*. Peraturan Bupati ini sebagian besar didasarkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sejak tahun 2015, tabel berikut menggambarkan tahapan pengelolaan keuangan desa menggunakan *E-Village Budgeting* sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015.:

No.	Tahapan	Penjelasan
1.	Perencanaan	Perencanaan merupakan langkah awal dalam mengelola keuangan desa dengan aplikasi E-Village Budgeting. Kepala Bidang Perencanaan Desa yang menjadi operator aplikasi E-Village Budgeting, mengunggah APBDesa ke aplikasi E-Village Budgeting dan menunggu konfirmasi persetujuan dari pemerintah kecamatan. Pada aplikasi E-Village Budgeting, status rancangan APBDesa berubah menjadi “disetujui” jika telah disetujui oleh pemerintah kecamatan.
2.	Pelaksanaan	Bendahara Desa yang merangkap sebagai Operator Implementasi sistem E-Village Budgeting melakukan tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam aplikasi E-Village Budgeting, dengan dibantu oleh Sekretaris Desa. Penerimaan dan pengeluaran selalu didukung dengan bukti-bukti yang sah, yang diperiksa oleh Sekretaris Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Untuk setiap proses transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran desa, Penyelenggara Perencanaan Desa mengunggah ke E-Village Budgeting System bukti transaksi yang sah dari pengeluaran kas, disertai dengan nama penanggung jawab bukti transaksi.
3.	Penatausahaan	Pada tahapan penyelenggaraan keuangan desa, pembukuan digunakan untuk mencatat transaksi yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Dalam Buku Kas Umum, Bendahara Desa mencatat semua penerimaan kas dan sayembara. Pada saat penerimaan dan pengeluaran diunggah ke E-Village Budgeting System, Buku Kas Umum secara otomatis disusun pada tahap administrasi keuangan desa menggunakan E-Village Budgeting System. Planning Kaur mengunggah faktur pajak ke Sistem EVB untuk setoran pajak.
4.	Pelaporan	Pada tahap pelaporan dengan menggunakan Sistem EVB, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Desa secara otomatis

		<p>dihasilkan ketika Penyelenggara Perencanaan mengunggah transaksi penerimaan dan pengeluaran kas desa. Laporan realisasi semester pertama diunggah pada bulan Juni, sedangkan laporan akhir tahun diunggah pada Desember 2016. Pemerintah kabupaten akan menutup Sistem E-Village Budgeting pada akhir Desember, sehingga Pemerintah Desa tidak terlambat. dalam mengupload transaksi aktivitas untuk tahun berjalan. Jika Sistem EVB telah dimatikan, pemerintah desa tidak dapat mengunggah atau mengubah transaksi dari program yang dijalankan desa.</p>
5.	Pertanggungjawaban	<p>Melalui Sistem EVB, pemerintah kabupaten menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Dalam Sistem E-Village Budgeting, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dapat disajikan sesuai Realisasi Anggaran per Sumber Anggaran, seperti Bantuan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Imbalan PBB, dan kelompok berbasis sumber anggaran lainnya. Masyarakat desa tidak dapat mengakses sistem E-Village Budgeting. Sehingga aplikasi E-Village Budgeting tidak dapat digunakan untuk mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat desa, seperti aplikasi untuk mempublikasikan laporan penggunaan dana.</p>

Sumber (Wahyuni et al., 2019)

Jika di kaji dengan menggunakan teori akuntabilitas publik, tahapan penggunaan aplikasi EVB sudah relevan dengan teori tersebut yang dimana penggunaan aplikasi ini telah dilakukan dengan urutan tahapan yang tepat yakni mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggung jawaban. Seperti terlihat di salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi yaitu Desa Tumerejo, penerapan aplikasi EVB telah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Temurejo. Meskipun terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan pelaporan yang tepat waktu karena kurangnya komitmen dari aparat desa, namun semua tahapan pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal dan horizontal. (Marantika (2017) dalam (Oktavia & Handayani, 2019)).

EVB sangat bermanfaat bagi kerja aparat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa; sebuah proses yang awalnya sangat melelahkan dan

memakan waktu dapat disederhanakan dan disederhanakan. Akun yang diperlukan untuk administrasi sudah ada di EVB, dan secara otomatis dikompilasi untuk pelaporan sebagai bagian dari prosedur administrasi. Selain itu, tingkat akurasi sangat tinggi, dan tidak perlu khawatir kehilangan dokumen laporan dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan sistem terintegrasi yang meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa melalui EVB, pemangku kepentingan dapat memantau penggunaan dana APBDesa. Melacak perkembangan kegiatan terkait APBDesa (Mutamimmah et al., 2018).

c. Penggunaan Aplikasi E-Village Budgeting Dalam Mengurangi Kasus Tindak Pidana Korupsi

Tujuan utama dari penerapan EVB adalah untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintahan yang telah diberi kewenangan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri tanpa harus menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Penerapan EVB diharapkan tidak hanya memudahkan percepatan atau penyederhanaan seluruh prosedur pengelolaan keuangan ADD, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan memahami penyebab korupsi, dimungkinkan untuk memilih alat kebijakan yang paling efektif untuk mencegah korupsi. Besarnya dana yang disediakan pemerintah untuk mendukung program pembangunan pedesaan meningkatkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kebijakan pencegahan kejahatan harus dilaksanakan melalui perencanaan yang komprehensif dan logis sebagai respon terhadap kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi EVB.

Mengenai kasus korupsi, negara memainkan peran penting dalam pencegahan dan pemberantasannya. Negara tidak boleh menjadi peserta pasif dalam pemberantasan korupsi. Jika para pemimpin negara mendukung strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka strategi tersebut akan berjalan efektif, dan jika tidak, strategi tersebut tidak akan efektif karena tidak akan berhasil. Hal itu akan berdampak pada jumlah kasus korupsi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ketika pemerintah memainkan perannya dalam pemberantasan korupsi secara maksimal.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, peran serta masyarakat dalam pengawasan aparatur daerah juga sangat penting. Kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuannya dalam menegakkan hak, seperti hak untuk memperoleh informasi, merupakan prinsip penting yang tidak boleh diabaikan dalam pemberantasan korupsi. Individu yang acuh terhadap haknya akan menciptakan peluang korupsi yang sangat besar. Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian hadiah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

harus diatur dengan Peraturan Pemerintah. Partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bebas korupsi. Selain itu, dengan peningkatan keterlibatan masyarakat, kontrol sosial terhadap korupsi akan dilaksanakan.

Melibatkan masyarakat juga penting dalam pencegahan korupsi melalui aplikasi EVB, karena semua hasil terkait proses pengelolaan keuangan ADD harus dilaporkan kepada publik melalui media informasi yang dapat menyampaikan hasil tersebut. Hal ini sesuai dengan teori Perubahan Struktur karena aplikasi EVB memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi, khususnya dalam memantau kinerja Kepala Desa dan timnya dalam pengelolaan keuangan ADD. Jika hasil kerja perangkat desa kurang memuaskan atau ada yang salah dengan proses pengelolaan keuangan secara keseluruhan, masyarakat dapat menilai dan mengkritisi hasilnya. Apabila masyarakat melihat adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang ada, maka masyarakat juga dapat mengajukan pengaduan kepada pihak yang kewenangannya disebutkan dalam media informasi sehingga dapat dilakukan investigasi tambahan terkait fraud.

Dana ADD tidak lagi didistribusikan secara manual di aplikasi EVB; sebaliknya, semua proses penyaluran dana dilakukan melalui sistem keuangan online di sistem. Dengan memanfaatkan sistem keuangan online, peluang pejabat pemerintah untuk melakukan tindak pidana korupsi dihilangkan, karena tidak mungkin lagi mereka "setuju" untuk melakukan korupsi dengan pejabat korup lainnya, karena semua urusan pengelolaan keuangan dilakukan secara online dan langsung dengan pejabat negara. pemerintah lokal. Ketika penyaluran dana ADD yang dibebankan langsung ke individu dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh bagian keuangan di kantornya, hal ini dikarenakan lokasi dana tersebut tidak diawasi secara ketat. Penerapan sistem penarikan melalui sistem perbankan atau sistem online yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah mencabut kewenangan tak terbatas departemen keuangan desa untuk melakukan penarikan. Tujuan dari strategi preventif adalah untuk mencegah terjadinya korupsi dengan menghilangkan atau meminimalkan penyebab atau peluangnya.

Kabupaten Banyuwangi telah mendapat pengakuan dari RAD-PPKT atas penerapannya dalam penyediaan dana secara online atau melalui sistem perbankan, yang merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terpadu (RAD-PPKT) tingkat Jawa Timur diserahkan kepada Kabupaten Banyuwangi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan tersebut diberikan karena Pemkab Banyuwangi berupaya memberikan kemudahan bagi pelayanan publik. Ada 150 layanan publik, termasuk administrasi kependudukan, izin usaha, pertanahan, BPJS, dan PDAM, terintegrasi dalam satu lokasi yang dikenal sebagai Mall Layanan Umum. Juga dianggap memiliki sistem keuangan yang transparan dan akuntabel adalah Kabupaten Banyuwangi. KPK yang merupakan

lembaga yang berwenang memberantas korupsi di Indonesia tidak sembarangan menilai bidang terkait. Dalam hal ini, KPK menyelidiki, menganalisis, dan menguji bagaimana seluruh sistem di Kabupaten Banyuwangi dimasukkan ke dalam aplikasi EVB.

Upaya Pemkab Banyuwangi dalam memberantas korupsi akan ditopang dengan pengakuan dan apresiasi tersebut. Munculnya aplikasi EVB dapat mengurangi jumlah pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Semua penganggaran, penarikan, dan pertanggungjawaban diawasi langsung oleh pengawas keuangan yang dapat memantau secara real time. Semakin sedikit pihak yang terlibat dalam proses penyaluran dana ADD, semakin kecil peluang terjadinya korupsi, karena sistem pengawasan dapat dilakukan secara efektif yaitu hanya beberapa pihak yang diawasi dan pengawasan juga dilakukan secara langsung. Penggunaan aplikasi EVB yang dinilai tidak lagi memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi, dinilai efektif untuk memantau dan mengamankan penyaluran dana ADD dari tingkat pemerintahan tertinggi hingga terendah. (Rizaldy et al., 2020).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan uraian pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi yang pesat memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi yang sebelumnya dilakukan secara manual namun kini dilakukan secara online melalui aplikasi, menjadi ilustrasinya. EVB atau yang lebih dikenal dengan EVB merupakan inovasi dan terobosan baru yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa yang seringkali tidak teratur secara administratif dan rentan terhadap penyimpangan anggaran. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa yang diperoleh dari dana desa dan alokasi dana desa, pengelolaan pemerintahan desa di Kabupaten Banyuwangi mengharuskan pemerintah desa untuk melakukan beberapa tahapan terkait dengan sistem pelaporan keuangan desa. Tahapan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dengan sistem EVB, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat meningkatkan kinerja laporan keuangan dengan penganggaran dari tahap perencanaan hingga pelaporan secara akuntabel, terbuka, dan tepat sasaran, serta meningkatkan kinerja aparat pemerintah desa agar lebih efektif dan efisien. efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Selain itu, keberadaan aplikasi EVB ini turut andil dalam pengurangan tindak pidana nonkorupsi. Adanya aplikasi EVB dapat mencegah terjadinya korupsi dalam alokasi Dana Desa dalam beberapa hal, seperti dengan menutup ruang atau kesempatan pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi. Semua proses dan tahapan pengelolaan keuangan ADD yang ada telah dilaksanakan secara online, dan ini

termasuk juga penarikan dana, karena semuanya kini telah diselesaikan secara online. Tindakan ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi kasus korupsi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Chandra Eko W. U., Moch. Hariadi, 2016, *Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota*, Teknik Elektro, ITS, Surabaya.
- Iswahyudi, M. (2017). Determinan Sikap Pemerintah Desa dalam Menggunakan Sistem E-village Budgeting. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(2), 102–108. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017.003.02.3>
- Maulidia, H. (2019). *Implementasi Program Smart Kampung (Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi)*. 1–19.
- Mutamimmah, M. R., Kustono, A. S., & Effendi, R. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa Melalui E-Village Budgeting di Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 105. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7746>
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik e-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/758/547>
- Nurita, R. F. (2016). Penerapan Layanan E-Government Dalam Perwujudan Good Governance Di Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 238–246. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1914>
- Nurjamiyah, & Dewi, A. R. (2020). Aplikasi Pengelolaan Keuangan Melalui E-Village Budgeting Sebagai Sarana Transparansi Pengelolaan Keuangan. *Journal of Information System Research (JOSH)*, 1(2), 77–81.
- Oktavia, T. A., & Handayani, N. (2019). Analisis Implementasi E-Village Budgeting Sebagai Perwujudan Akuntabilitas Dan Transparansi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi: Volume 8, Nomor 9*.
- Puspita, D. A. (2018). Perbaikan Pelaporan Keuangan Desa Melalui Inovasi Sistem E-Village Budgeting Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Vol. 12, No. 2*, 68–74.
- Pratiwi, R. N. (2016). Manajemen Keuangan Desa Melalui Inovasi Electronic Village Budgeting (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(3), 123–130.
- Rizaldy, I., Rusdiana, E., & Ahmad, G. A. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mengurangi Tindak Pidana. *JURNAL HUKUM Volume 7 Nomor 1*, 7.
- Sabino Mariano. (2018). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Satia Utama, A. A. G., & Zahari, A. R. (2019). E-Village Budgeting: Efektivitas Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 16(1), 54–75. <https://doi.org/10.14710/jaa.16.1.54-75>
- Wahyuni, E. D., Mubaroq, G. K., & Latifah, S. W. (2019). Analysis Of E-Village Budgeting System Effectiveness In Village Financial Management In Banyuwangi District (Case Study in Genteng Wetan Village, Genteng District). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 107. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i1.6883>